

Adaptasi Masyarakat Grobogan Menghadapi Kekeringan dalam Kebijakan Swasembada Pangan 1988-1998

Wiji Astuti✉

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding author
wijiastuti@students.unnes.ac.id

Received: 15-10-2025 | Revised: 11-11-2025 | Accepted: 30-11-2025

ABSTRAK

Kabupaten Grobogan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2023), Grobogan menempati posisi tertinggi di Jawa Tengah dengan 87 desa terdampak kekeringan, menggambarkan kondisi yang telah berlangsung lama sejak periode pelaksanaan kebijakan swasembada pangan (1988–1998). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk adaptasi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat Grobogan dalam menghadapi kekeringan serta menilai pengaruh kebijakan swasembada pangan terhadap strategi bertahan hidup dan pola produksi pertanian masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis dan analisis dokumen, serta pengolahan data sekunder dari BNPB dan sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Grobogan mengembangkan adaptasi sosial berbasis gotong royong, diversifikasi ekonomi rumah tangga, dan inovasi teknologi sederhana seperti pembuatan sumur dangkal, embung kecil, serta penggunaan pompa air. Kebijakan swasembada pangan berpengaruh signifikan terhadap pola tanam bergilir antara padi dan palawija serta peningkatan penggunaan input modern, meskipun efektivitasnya terbatas oleh kondisi alam yang kering. Kesimpulannya, kemampuan masyarakat Grobogan untuk beradaptasi secara mandiri menjadi faktor utama ketahanan pangan lokal di tengah keterbatasan kebijakan nasional dan perubahan lingkungan.

Grobogan Regency is known as one of the areas in Java Island that is highly vulnerable to drought. According to data from the National Disaster Management Agency (BNPB, 2023), Grobogan ranks highest in Central Java, with 87 villages affected by drought reflecting a condition that has persisted since the implementation of the national food self-sufficiency policy (1988–1998). This study aims to analyze the forms of social, economic, and technological adaptation of the Grobogan community in facing drought, as well as to assess the influence of the government's food self-sufficiency policy on their survival strategies and agricultural production patterns. The research uses a descriptive qualitative method with a historical approach and document analysis, utilizing secondary data from BNPB and related literature sources. The results indicate that the Grobogan community developed social adaptations based on mutual cooperation, household economic diversification, and simple technological innovations such as shallow wells, small reservoirs (embung), and the use of water pumps. The food self-sufficiency policy significantly influenced crop rotation patterns between rice and secondary crops and increased the use of modern agricultural inputs, although its effectiveness was limited by the region's arid conditions. In conclusion, the community's capacity for self-reliant adaptation became the key factor in maintaining local food resilience amid national policy constraints and environmental challenges.

Kata Kunci: adaptasi sosial, grobogan, kekeringan, swasembada pangan

Pendahuluan

Kekeringan merupakan salah satu bencana hidrometeorologis yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada wilayah yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. Fenomena ini ditandai oleh berkurangnya ketersediaan air dalam jangka waktu tertentu akibat curah hujan yang berada di bawah kondisi normal, sehingga memengaruhi produktivitas lahan, ketahanan pangan, serta keberlanjutan kehidupan sosial

ekonomi masyarakat (Wilhite & Pulwarty, 2017; Azieh et al., 2021). Di Indonesia, kekeringan menjadi persoalan yang terus berulang dan memiliki konsekuensi serius bagi daerah-daerah agraris yang masih bergantung pada pola pertanian berbasis musim dan ketersediaan air alami (Aldrian et al., 2021). Oleh karena itu, kajian mengenai respons masyarakat terhadap kekeringan menjadi penting untuk memahami bagaimana komunitas lokal membangun ketahanan dalam menghadapi tekanan lingkungan yang berlangsung secara berulang.

Dalam konteks pembangunan pertanian nasional, persoalan kekeringan tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan negara yang bertujuan meningkatkan produksi pangan. Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan kebijakan swasembada pangan secara intensif melalui program modernisasi pertanian yang menekankan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, serta pengembangan jaringan irigasi (Booth, 2019; Aqil Afriawan, 2024). Kebijakan tersebut berhasil mengantarkan Indonesia memperoleh pengakuan internasional atas keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan adaptasi yang sama di seluruh wilayah karena adanya perbedaan kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat pedesaan (Rigg, 2019; Elviana & Susilowati, 2024).

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut. Secara geografis, wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap kekeringan akibat kondisi iklim, karakteristik tanah, serta keterbatasan sumber daya air yang tersedia selama musim kemarau (Purnama et al., 2020). Di sisi lain, Grobogan juga dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi pertanian yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program swasembada pangan nasional. Kondisi tersebut menciptakan paradoks antara tuntutan peningkatan produksi pertanian dengan keterbatasan ekologis yang dihadapi masyarakat setempat.

Dalam perspektif ekologi manusia, adaptasi dipahami sebagai proses penyesuaian yang dilakukan individu maupun kelompok masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya ketika menghadapi perubahan lingkungan (Moran, 2018). Adaptasi tidak hanya mencakup aspek teknis dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga melibatkan perubahan strategi ekonomi, penguatan jaringan sosial, serta pemanfaatan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Azieh et al., 2021). Dengan demikian, masyarakat tidak diposisikan sebagai korban pasif dari perubahan lingkungan, melainkan sebagai aktor yang secara aktif mengembangkan berbagai strategi untuk mengurangi risiko dan mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara kekeringan dan strategi adaptasi masyarakat pedesaan. Penelitian Azieh et al. (2021) menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap tekanan lingkungan. Budiman dan Santu (2024) menemukan bahwa efektivitas adaptasi masyarakat juga dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, kajian mengenai swasembada pangan pada masa Orde Baru lebih banyak menyoroti keberhasilan peningkatan produksi pertanian dan transformasi sektor agraria nasional (Booth, 2019; Aqil Afriawan, 2024). Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan kebijakan swasembada pangan dengan pengalaman historis masyarakat lokal dalam menghadapi kekeringan masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap). Sebagian besar studi mengenai swasembada pangan berfokus pada aspek kebijakan dan capaian produksi nasional, sedangkan penelitian mengenai kekeringan lebih banyak menitikberatkan pada aspek lingkungan dan mitigasi bencana kontemporer. Akibatnya, dinamika adaptasi

masyarakat di tingkat lokal sebagai respons terhadap pertemuan antara tekanan ekologis dan intervensi kebijakan negara belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, pemahaman terhadap pengalaman historis masyarakat tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana komunitas lokal membangun ketahanan di tengah perubahan lingkungan dan transformasi kebijakan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk adaptasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang dilakukan masyarakat Grobogan dalam menghadapi kekeringan selama pelaksanaan kebijakan swasembada pangan pada periode 1988–1998. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kebijakan swasembada pangan terhadap strategi bertahan hidup dan pola produksi pertanian masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang berulang. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah sejarah sosial dan sejarah lingkungan di Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan antara masyarakat, lingkungan, dan kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah (*historical research*) untuk mengkaji adaptasi sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat Kabupaten Grobogan dalam menghadapi kekeringan pada masa pelaksanaan kebijakan swasembada pangan periode 1988–1998. Metode sejarah dipilih karena memungkinkan peneliti merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan (Kuntowijoyo, 2013; Gottschalk, 2008). Data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap arsip kebijakan pemerintah, laporan kebencanaan, publikasi statistik, dokumen perencanaan pembangunan, artikel jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekeringan, pembangunan pertanian, dan dinamika masyarakat pedesaan di Grobogan. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan heuristik, yaitu proses penelusuran, identifikasi, dan seleksi sumber-sumber sejarah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya, setiap sumber yang diperoleh dievaluasi melalui kritik eksternal dan kritik internal untuk memastikan keaslian, kredibilitas, serta relevansi informasi yang terkandung di dalamnya (Sjamsuddin, 2019).

Analisis data dilakukan secara induktif dengan menafsirkan berbagai informasi yang telah diverifikasi untuk menemukan pola hubungan antara kondisi kekeringan, implementasi kebijakan swasembada pangan, dan strategi adaptasi masyarakat setempat. Proses analisis berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk adaptasi yang berkembang dalam aspek sosial, ekonomi, dan teknologi pertanian, serta bagaimana masyarakat merespons tekanan lingkungan dan kebijakan pembangunan yang berlangsung pada periode penelitian. Tahap interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan ekologis yang melatarbelakangi munculnya berbagai strategi bertahan hidup masyarakat (Creswell & Poth, 2018). Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan data dari berbagai dokumen pemerintah, laporan statistik, dan literatur akademik sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika adaptasi masyarakat Grobogan. Hasil interpretasi kemudian disajikan dalam bentuk historiografi yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan negara, kondisi lingkungan, dan respons masyarakat secara utuh dan kronologis (Gottschalk, 2008; Kuntowijoyo, 2013).

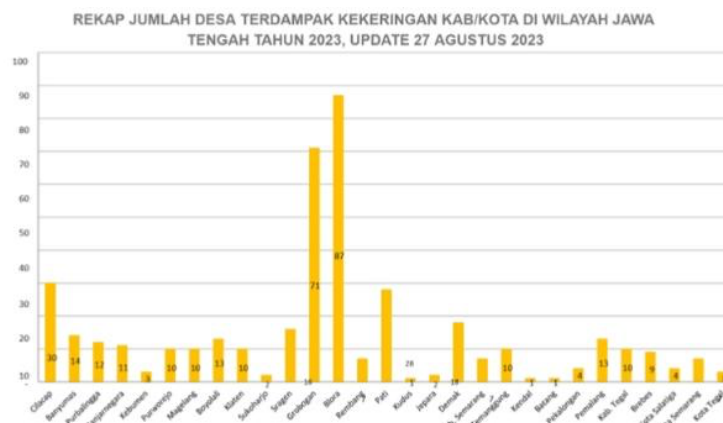
Hasil dan pembahasan

Bentuk Adaptasi Sosial, Ekonomi, Dan Teknologi Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Grobogan Dalam Menghadapi Kekeringan Selama Pelaksanaan Kebijakan Swasembada Pangan Pada Periode 1988–1998

Tabel 1. 3 Tiga Kabupaten Dengan Jumlah Desa Terdampak Kekeringan Tertinggi Di Jawa Tengah Tahun 2023

| No | Kabupaten | Jumlah Desa terdampak Kekeringan (2023) |
|----|-----------|---|
| 1 | Grobogan | 87 desa |
| 2 | Sragen | 77 desa |
| 3 | Blora | 28 desa |

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025)



Gambar 1. Grafik Rekap Jumlah Desa Terdampak Kekeringan Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023; Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kabupaten Grobogan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan di Pulau Jawa. Berdasarkan data terbaru yang menunjukkan rekap jumlah desa terdampak kekeringan di Jawa Tengah tahun 2023 (update 27 Agustus 2023), Grobogan menempati posisi paling tinggi dengan 87 desa terdampak, disusul oleh Blora dengan 71 desa, dan Pati dengan 28 desa. Meskipun data tersebut menggambarkan kondisi terkini, pola kekeringan ini sejatinya telah menjadi masalah kronis yang telah dialami masyarakat Grobogan sejak masa lalu, termasuk pada periode 1988–1998, ketika pemerintah Indonesia sedang gencar melaksanakan kebijakan swasembada pangan di bawah rezim Orde Baru. Kondisi alam yang cenderung kering dengan curah hujan rendah serta ketergantungan tinggi terhadap pertanian lahan tadah hujan membuat masyarakat Grobogan harus melakukan berbagai bentuk adaptasi sosial, ekonomi, dan teknologi agar tetap mampu bertahan dalam menghadapi tekanan lingkungan sekaligus tuntutan kebijakan nasional yang menekankan peningkatan produksi pangan, khususnya beras.

Masyarakat Grobogan membangun bentuk adaptasi berbasis solidaritas dan gotong royong yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis air. Ketika musim kemarau panjang melanda, warga di banyak desa terdampak melakukan kerja bakti untuk menggali sumur dangkal atau membuat penampungan air sederhana menggunakan bahan lokal seperti tanah liat, bambu, dan batu kali. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan air rumah tangga dan ternak tetap terpenuhi. Dalam situasi air menjadi sumber kehidupan yang langka, muncul sistem sosial berbasis kepercayaan dan tanggung jawab kolektif, di mana pembagian air dilakukan secara bergilir dan diawasi oleh tokoh masyarakat atau kepala dusun. Solidaritas sosial ini bukan hanya bertujuan untuk bertahan hidup, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan antarwarga dalam menghadapi krisis yang sama (Farah et al., 2024). Muncul pula kelompok perempuan yang

berperan penting dalam mengelola cadangan air rumah tangga dan memanfaatkan limbah air cucian untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman atau mencuci peralatan dapur. Bentuk adaptasi sosial ini memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk berinovasi secara tradisional tanpa mengandalkan bantuan eksternal yang signifikan dari pemerintah, mengingat kebijakan nasional pada masa itu lebih terfokus pada aspek produksi ketimbang kesejahteraan sosial petani di daerah rawan bencana seperti Grobogan

Kekeringan yang terus-menerus mendorong masyarakat Grobogan melakukan diversifikasi sumber penghasilan sebagai bentuk adaptasi terhadap ketidakpastian hasil pertanian. Banyak petani yang pada awalnya bergantung sepenuhnya pada tanaman padi beralih menanam palawija seperti jagung, ketela pohon, kacang tanah, dan kedelai yang membutuhkan air lebih sedikit dan lebih tahan terhadap kondisi tanah kering. Langkah ini merupakan bentuk strategi bertahan yang rasional karena tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi alam, tetapi juga mendukung kebijakan swasembada pangan yang tidak semata-mata berorientasi pada beras. Pada masa itu mulai tumbuh kegiatan ekonomi alternatif di luar sektor pertanian, seperti buruh migran ke daerah perkotaan, perdagangan kecil, serta usaha ternak kambing dan sapi yang relatif lebih mudah dikelola pada musim kering. Remitansi dari anggota keluarga yang bekerja di luar daerah menjadi sumber pendapatan tambahan yang penting untuk mempertahankan ekonomi rumah tangga desa (Hulu, 2023). Pola ekonomi seperti ini mencerminkan kemampuan masyarakat Grobogan dalam menyeimbangkan antara tuntutan kebijakan nasional dengan kondisi ekologis lokal yang keras.

Masyarakat mengembangkan sistem arisan gabah atau simpan-pinjam hasil panen yang dikelola secara swadaya untuk menghadapi masa paceklik. Sistem ini menjadi fondasi ekonomi solidaritas yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah tekanan kebijakan swasembada pangan yang sering kali tidak memberikan perlindungan langsung terhadap petani kecil (Sayaka et al., 2022). Adaptasi teknologi yang dilakukan masyarakat Grobogan dalam menghadapi kekeringan pada periode 1988–1998 menunjukkan transformasi yang cukup dinamis meskipun masih bersifat tradisional dan sederhana. Pemerintah melalui program intensifikasi pertanian (Panca Usaha Tani) mendorong penggunaan pupuk kimia, bibit unggul, dan teknologi irigasi sederhana untuk mendukung produktivitas lahan. Namun, karena keterbatasan akses terhadap sumber air dan infrastruktur irigasi, petani di Grobogan mengembangkan inovasi lokal seperti sumur pantek (sumur bor dangkal) dan sistem pengairan manual menggunakan pompa diesel atau ember. Beberapa kelompok tani mulai berinisiatif memanfaatkan embung kecil dan parit buatan untuk menampung air hujan sebagai cadangan irigasi pada musim kering. Adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal (local wisdom) yang diwariskan antar generasi petani dan menjadi kunci keberlanjutan produksi pangan di daerah yang minim sumber air.

Meskipun pemerintah lebih menekankan pada penyediaan sarana produksi modern, masyarakat Grobogan justru lebih banyak mengandalkan pendekatan adaptif berbasis pengalaman dan pengamatan terhadap pola musim. Misalnya, mereka menyesuaikan waktu tanam berdasarkan tanda-tanda alam seperti arah angin, pertumbuhan tanaman liar, atau perilaku hewan yang dianggap menunjukkan datangnya musim hujan. Praktik semacam ini menunjukkan sinergi antara tradisi dan inovasi teknologi sederhana yang bersifat lokal namun efektif. Periode 1988–1998 memperlihatkan bagaimana adaptasi teknologi masyarakat Grobogan mulai terpengaruh oleh intervensi pemerintah melalui program Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal) yang mendorong penerapan teknologi pertanian modern. Kekeringan yang kerap terjadi membuat implementasi program tersebut tidak selalu

berhasil. Petani yang memiliki modal cukup memanfaatkan mesin pompa air atau generator kecil untuk mengambil air tanah, sementara petani miskin tetap mengandalkan tenaga manusia dan hewan untuk proses irigasi dan pengolahan tanah. Peran kelompok tani menjadi semakin penting dalam mengatur pola tanam dan pembagian air agar semua anggota kelompok mendapat kesempatan mengolah lahan secara adil. Pola ini memperkuat adaptasi sosial dan kelembagaan yang mendukung kelangsungan kebijakan pangan pemerintah di tingkat lokal (Julianto, 2021).

Pada akhir dekade 1990-an, mulai diperkenalkan teknologi hemat air seperti sistem irigasi tetes dan penggunaan mulsa untuk menjaga kelembaban tanah, meskipun penerapannya masih terbatas di kalangan petani dengan akses pelatihan. Kondisi kekeringan yang terus berulang mendorong munculnya kesadaran ekologis di kalangan masyarakat Grobogan terhadap pentingnya konservasi sumber daya air. Sebagian masyarakat terlibat dalam kegiatan penghijauan dan penanaman pohon di daerah perbukitan serta sekitar sumber air. Kegiatan ini bukan hanya bagian dari adaptasi ekologis, tetapi juga mencerminkan bentuk partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mulai digaungkan pada akhir 1990-an. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus menjadi bentuk resistensi terhadap dampak negatif kebijakan swasembada pangan yang terlalu menekankan pada produksi intensif tanpa memperhatikan daya dukung alam. Adaptasi masyarakat Grobogan menunjukkan integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan teknologi yang saling mendukung: solidaritas sosial memperkuat ketahanan komunitas, diversifikasi ekonomi mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas, dan inovasi teknologi lokal menjaga keberlanjutan sumber daya alam di tengah keterbatasan.

Kebijakan Swasembada Pangan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Strategi Bertahan Hidup Dan Pola Produksi Pertanian Masyarakat Grobogan Di Tengah Kondisi Kekeringan Pada Kurun Waktu Tersebut

Kebijakan swasembada pangan pada masa itu berfokus pada intensifikasi pertanian, yaitu peningkatan hasil produksi melalui penggunaan input modern seperti pupuk kimia, pestisida, benih unggul, dan irigasi teknis. Pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi beras melalui program Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal) yang dijalankan hingga tingkat desa. Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut di Grobogan menghadapi kendala besar karena sebagian besar lahan pertanian di wilayah ini merupakan lahan tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan musiman. Ketika kekeringan melanda, sumber air permukaan dan sumur dangkal mengering, sehingga program intensifikasi menjadi sulit dilakukan secara optimal. Masyarakat Grobogan kemudian mulai menyesuaikan strategi bertahan hidupnya dengan cara mengombinasikan antara kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan penyesuaian lokal terhadap kondisi alam. Misalnya, meskipun program pemerintah mendorong penanaman padi, petani Grobogan kerap melakukan penanaman bergilir antara padi dan palawija seperti jagung, kacang tanah, atau ketela yang lebih tahan terhadap kekeringan. Pola tanam bergilir ini menjadi bentuk kompromi antara tekanan kebijakan nasional dan realitas lingkungan lokal.

Masyarakat Grobogan berhasil menyesuaikan kebijakan yang bersifat top-down menjadi praktik yang lebih realistis dan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Dampak kebijakan swasembada pangan terhadap pola produksi pertanian masyarakat Grobogan juga terlihat dari munculnya perubahan dalam sistem pengelolaan lahan dan tenaga kerja. Sebelum era intensifikasi, masyarakat cenderung menggunakan metode tradisional berbasis kearifan lokal

yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan untuk membajak lahan. Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan efisiensi memunculkan penggunaan alat pertanian semi-modern seperti hand tractor dan pompa air di kalangan petani yang memiliki akses terhadap modal dan bantuan pemerintah. Sayangnya, bagi sebagian besar petani kecil, akses terhadap teknologi tersebut sangat terbatas. Mereka tetap harus menggunakan cara tradisional dan menyesuaikan waktu tanam berdasarkan kondisi cuaca (Nugroho et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan swasembada pangan menciptakan kesenjangan sosial ekonomi di tingkat lokal antara petani yang mampu mengikuti program intensifikasi dengan dukungan modal dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya tersebut. Bagi petani kecil di Grobogan, keterbatasan ini justru melahirkan kreativitas baru dalam strategi bertahan hidup, seperti pembentukan kelompok tani swadaya untuk mengatur penggunaan air secara bergiliran, atau mengumpulkan dana bersama guna membeli pompa air bekas yang digunakan secara bergantian di lahan pertanian anggota kelompok. Praktik kolektif semacam ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak diterima secara pasif, melainkan diolah dan disesuaikan melalui mekanisme sosial yang berakar pada nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat desa.

Kebijakan swasembada pangan juga mengubah cara masyarakat Grobogan memandang hubungan antara pertanian dan sumber daya alam. Pemerintah mendorong konsep bahwa produktivitas lahan dapat terus ditingkatkan melalui input buatan seperti pupuk kimia dan pestisida. Namun, dalam konteks Grobogan yang rentan kekeringan, penggunaan pupuk kimia berlebihan justru memperburuk kualitas tanah yang sudah miskin unsur hara, sehingga pada jangka panjang menurunkan kesuburan lahan. Akibatnya, petani mulai melakukan adaptasi dengan cara mengombinasikan pupuk kimia dan pupuk organik dari limbah ternak atau sisa panen untuk menjaga daya dukung tanah. Adaptasi ini tidak hanya menjadi bentuk respons terhadap kondisi alam, tetapi juga strategi bertahan dalam sistem produksi yang menuntut hasil tinggi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan swasembada pangan memang berhasil mendorong peningkatan produksi pangan nasional, tetapi di daerah seperti Grobogan, keberhasilan tersebut hanya bisa dicapai melalui adaptasi lokal yang kompleks dan sering kali melibatkan pengorbanan ekologis maupun sosial.

Kebijakan swasembada pangan mendorong munculnya sistem ekonomi pertanian yang semakin terintegrasi dengan pasar nasional. Pemerintah menyediakan subsidi pupuk dan kredit pertanian melalui lembaga keuangan seperti Bank BRI, yang memungkinkan petani membeli input pertanian modern. Namun, sistem ini menciptakan ketergantungan baru bagi petani Grobogan terhadap pasokan pupuk bersubsidi dan harga jual hasil panen yang ditentukan pasar. Ketika kekeringan menyebabkan gagal panen, petani tetap harus membayar utang kepada lembaga keuangan, yang membuat sebagian dari mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Dalam kondisi demikian, banyak keluarga petani yang mengirim anggota keluarganya bekerja ke kota atau daerah lain sebagai buruh tani, kuli bangunan, atau pedagang kecil. Strategi migrasi ini menjadi salah satu bentuk adaptasi ekonomi yang signifikan terhadap tekanan kebijakan dan kondisi iklim. Kebijakan swasembada pangan secara tidak langsung mendorong perubahan struktur ekonomi rumah tangga di pedesaan Grobogan, dari yang semula berbasis pertanian subsisten menjadi ekonomi campuran yang mengandalkan pendapatan dari sektor non-pertanian.

Kebijakan tersebut membawa dampak sosial yang mendalam. Ketika produksi pertanian menjadi prioritas utama negara, masyarakat Grobogan dihadapkan pada tuntutan untuk terus menanam dan meningkatkan hasil, meskipun kondisi air semakin terbatas. Pemerintah melalui aparat desa dan penyuluh pertanian melakukan kontrol ketat terhadap pelaksanaan program,

seperti pengawasan waktu tanam, penggunaan pupuk, hingga target panen. Muncul dinamika sosial baru di tingkat lokal, di mana kepala desa dan kelompok tani memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan petani (Putra et al., 2024). Walaupun sistem ini bertujuan memperkuat koordinasi, dalam praktiknya sering kali terjadi ketegangan antara kepentingan kebijakan nasional dan realitas petani lokal yang tidak selalu sejalan. Namun, masyarakat Grobogan menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang tinggi dengan cara mematuhi kebijakan secara formal sambil tetap mempertahankan praktik tradisional yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi alam. Misalnya, sebagian petani tetap menggunakan metode perhitungan pranata mangsa untuk menentukan waktu tanam meskipun penyuluh pertanian memberikan jadwal tanam yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan swasembada pangan memang memiliki pengaruh besar terhadap pola produksi, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada fleksibilitas masyarakat dalam menafsirkan dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal.

Pada akhir dekade 1990-an ketika krisis ekonomi nasional melanda, banyak kebijakan pertanian mengalami penurunan efektivitas karena keterbatasan anggaran pemerintah. Dalam situasi tersebut, petani Grobogan semakin bergantung pada jaringan sosial lokal untuk bertahan. Sistem gotong royong dalam pengairan, berbagi hasil panen, hingga arisan gabah menjadi bentuk nyata dari adaptasi sosial-ekonomi yang mengakar. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan swasembada pangan memang berhasil membangun kesadaran nasional tentang pentingnya produksi pangan, tetapi tidak sepenuhnya mampu menjamin ketahanan pangan di tingkat lokal tanpa adanya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi secara mandiri. Keberhasilan petani Grobogan dalam mempertahankan produksi meskipun dilanda kekeringan yang kronis menunjukkan bahwa daya tahan masyarakat lokal jauh lebih berperan dibanding intervensi kebijakan formal yang datang dari atas (Rahajanti & Suryani, 2023). Hingga kini, seperti tergambar dalam data tahun 2023 yang menunjukkan Grobogan masih memiliki 87 desa terdampak kekeringan, pola adaptasi yang terbentuk pada era swasembada pangan tetap menjadi warisan dalam menghadapi ancaman krisis air yang berulang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan mengembangkan beragam strategi adaptasi untuk menghadapi kekeringan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan swasembada pangan pada periode 1988–1998. Adaptasi tersebut tercermin dalam penguatan solidaritas sosial melalui praktik gotong royong, diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga di luar sektor pertanian, serta pemanfaatan teknologi sederhana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan hidup tidak hanya ditentukan oleh dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan membangun mekanisme penyesuaian terhadap tekanan lingkungan. Dengan demikian, bentuk-bentuk adaptasi yang berkembang di Grobogan menjadi bagian penting dari strategi ketahanan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan air dan risiko gagal panen yang berulang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan swasembada pangan memberikan pengaruh yang kompleks terhadap pola produksi pertanian dan strategi bertahan hidup masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut mendorong modernisasi sektor pertanian, tetapi di sisi lain belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik ekologis wilayah yang rentan terhadap kekeringan. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mengombinasikan

berbagai pendekatan lokal dengan praktik pertanian yang diperkenalkan melalui program pemerintah. Temuan tersebut memperkaya kajian sejarah sosial dan sejarah lingkungan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, melainkan juga pada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam perbandingan strategi adaptasi di berbagai daerah rawan kekeringan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan, kondisi lingkungan, dan ketahanan masyarakat pedesaan.

Daftar Pustaka

- Aqil Afriawan, M. D. A. (2024). Pemanfaatan pupuk organik sebagai mitigasi bencana kekeringan dengan metode diversifikasi pertanian periode 2020–2023 di Grobogan Jawa Tengah. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 11(3), 163–174.
- Azieh, A. F., Supriyadi, T., Dewi, T. S. K., & Saputra, A. F. (2021). Analisis pertumbuhan kedelai varietas Grobogan pada cekaman kekeringan. *Jurnal Ilmiah Agrineca*, 21(1), 25–33.
- Booth, A. (2019). *Living standards in Southeast Asia: Changes over the long twentieth century, 1900–2015*. Amsterdam University Press.
- Budiman, N. D., & Santu, L. (2024). Kajian strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada beras. *Jurnal Pertanian Cemara*, 21(2), 125–136.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Elviana, V., & Susilowati, T. (2024). Gambaran pengetahuan dan peran masyarakat tentang sistem peringatan dini pada bencana kekeringan di Desa Simo. *Indonesian Journal of Public Health*, 2(3), 663–670.
- Farah, U. N., Prasetyo, Y., & Bashit, N. (2024). Monitoring potensi kekeringan di Kabupaten Grobogan menggunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. *Media Komunikasi Geografi*, 25(1), 97–119.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto). UI Press.
- Hulu, A. (2023). Studi inovasi strategi kebijakan percepatan pencapaian swasembada kedelai Indonesia tahun 2035. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(1), 13–23.
- Irawati, E., Fianti, F., & Nurbaiti, U. (n.d.). Perbandingan tanaman jagung dan kacang hijau pada musim kekeringan di Grobogan. *EnviroScienteeae*, 17(1), 18–23.
- Julianto, F. D. (2021). Analisis sebaran potensi kekeringan dengan cloud computing platform di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 1(1).
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Nugroho, J. S., Indrasto, H. B. B., Salsabila, F., & Kartika, A. P. (2025). Penguatan ketahanan masyarakat Desa Pagerjuran terhadap perubahan iklim melalui mitigasi kekeringan dan longsor berbasis partisipatif. *IKRA-ITH Abdimas*, 9(2), 371–380.
- Putra, H. B., Suheryanto, A., & Sunarwanto, H. (2024). Simulasi dan analisis kebutuhan sumur resapan untuk mengurangi dampak kekeringan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 1(2), 109–116.
- Rahajanti, D. A. W., & Suryani, T. A. (2023). Identifikasi kondisi sosial masyarakat Kecamatan Kradenan sebagai daerah rawan bencana kekeringan. *Prosiding FTSP Series*, 1843–1848.

- Sayaka, B., Sudaryanto, T., & Wahyuni, S. (2022). Upaya petani dan pemerintah menghadapi bencana kekeringan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 40(1), 25–38.
- Sjamsuddin, H. (2019). *Metodologi sejarah*. Ombak.